



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Ernawati Ismail¹, Irawaty Igrisa², Sukarman Kamuli³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia²

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia³

Korespondensi: ernawatiismail2410@gmail.com,

ABSTRACT

This research aimed to analyze the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) policy in Suwawa Selatan Sub-district, Bone Bolango Regency, and to identify the factors determining its success. It employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document study, then analysed using data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of the BSPS policy consists of three main stages: planning, implementation, and reporting. Planning followed the existing procedures, but obstacles remain in delivering information to the community. The implementation stage ran moderately effective with the support of field facilitators, although it faced challenges such as delays in building materials and limited labour. At the reporting stage, the procedures were carried out properly, with the reports prepared by the community under the guidance of field facilitators (TFL). The determining factors for successful program implementation include communication, resources, implementers' disposition, and bureaucratic structure. Among these factors, resources were the most dominant and influential, leading to the smooth progress of physical construction. Overall, the implementation of BSPS in Suwawa Selatan Sub-district is considered relatively effective, but improvements in outreach program and strengthening of supporting resources are still needed to achieve more optimal results.

Keyword: Policy Implementation, Self-Help Housing, Stimulant Assistance Program (BSPS).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BSPS meliputi tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan telah mengikuti prosedur yang berlaku, namun masih terdapat hambatan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Tahap pelaksanaan berjalan cukup efektif dengan dukungan fasilitator lapangan, meskipun menghadapi kendala seperti keterlambatan bahan bangunan dan keterbatasan tenaga kerja. Pada tahap pelaporan, prosedurnya telah dijalankan dengan baik serta dalam penyusunannya dilkakukan oleh masyarakat didampingi oleh TFL. Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi program meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Di antara faktor-faktor tersebut, sumber daya menjadi faktor paling dominan karena berkaitan langsung dengan kelancaran pembangunan fisik. Secara keseluruhan, implementasi BSPS di Kecamatan Suwawa Selatan dinilai cukup efektif, namun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar di Indonesia yang berdampak langsung pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, termasuk keterbatasan akses terhadap hunian layak. Data BPS Bone Bolango (2021) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten tersebut masih cukup tinggi, dengan persentase mencapai 16,30% pada tahun 2021. Kondisi ini berimplikasi pada masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai respon, pemerintah meluncurkan berbagai program perumahan, salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diatur melalui Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2018, dengan tujuan mendorong swadaya masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah maupun pembangunan rumah baru. Implementasi BSPS melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah serta menekankan partisipasi aktif masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program BSPS di tingkat lokal tidak lepas dari berbagai tantangan. Di Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, ditemukan beberapa 3 permasalahan seperti keterbatasan tenaga kerja, kendala dalam pendataan calon penerima manfaat, serta keterlambatan distribusi bahan bangunan. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas implementasi program dan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Kajian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, penelitian mengenai implementasi BSPS di Kecamatan Suwawa Selatan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan BSPS di Kecamatan Suwawa Selatan melalui tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan informan kunci; (2) observasi langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan; dan (3) studi dokumentasi untuk memperoleh data pendukung yang bersifat administratif maupun regulatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Implementasi Program BSPS di Kecamatan Suwawa Selatan Pelaksanaan Program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Suwawa Selatan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tahap Perencanaan

Perencanaan program dilakukan melalui sosialisasi dan pendataan masyarakat calon penerima manfaat. Proses verifikasi didasarkan pada kriteria yang ditetapkan, seperti status kepemilikan lahan, kondisi rumah, serta tingkat pendapatan. Namun demikian, tahap ini masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat dan kesulitan tim pendata menjangkau warga yang bekerja di ladang atau luar rumah.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, masyarakat penerima bantuan difasilitasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pengelolaan dana serta penyediaan bahan bangunan. Pelaksanaan berjalan cukup efektif, meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan distribusi material, keterbatasan tukang bangunan, serta adanya penerima manfaat yang membangun rumah melebihi standar bantuan yang tersedia.

Tahap Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilakukan oleh kelompok penerima manfaat dengan pendampingan dari TFL. Proses ini relatif sesuai dengan prosedur, meskipun kualitas administrasi masih bergantung pada kapasitas masyarakat dalam menyusun laporan.

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Mengacu pada teori Edward III, terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan BSPS di Kecamatan Suwawa Selatan:

Komunikasi

Informasi mengenai program telah disampaikan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat sasaran sehingga masih menimbulkan kesenjangan pemahaman.

Sumber Daya

Faktor ini menjadi dominan, meliputi ketersediaan dana, tenaga kerja, serta dukungan teknis dari TFL. Keterbatasan tenaga tukang dan keterlambatan material menjadi hambatan yang signifikan.

Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen aparat pelaksana serta fasilitator lapangan cukup mendukung, meskipun terdapat perbedaan pemahaman antara pelaksana teknis dan masyarakat penerima manfaat.

Struktur Birokrasi

Kejelasan prosedur dan alur koordinasi cukup membantu kelancaran program, namun fragmentasi birokrasi terkadang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Secara umum, implementasi BSPS di Kecamatan Suwawa Selatan dapat dikategorikan relatif efektif. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah sesuai dengan regulasi, meskipun belum sepenuhnya optimal. Faktor sumber daya terbukti menjadi elemen paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan implementasi, sejalan dengan temuan Edward III

(1980) bahwa ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat utama efektivitas kebijakan. Permasalahan dalam aspek komunikasi dan ketersediaan tenaga kerja menunjukkan perlunya penguatan strategi sosialisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya lokal. Selain itu, perbaikan koordinasi antar instansi dan dukungan sarana prasarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas implementasi program di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Suwawa Selatan telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Secara umum, program berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja, keterlambatan distribusi material, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada penerima manfaat.

Faktor sumber daya menjadi aspek paling dominan yang menentukan keberhasilan program, sementara komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi juga berkontribusi penting. Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai dan komunikasi yang efektif antara pelaksana dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan perumahan berbasis swadaya.

Keterbatasan penelitian ini adalah lingkupnya yang terbatas pada satu kecamatan,

sehingga belum dapat menggambarkan implementasi BSPS secara lebih luas di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih besar serta menggunakan pendekatan komparatif. 5

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyediaan sumber daya yang lebih memadai baik dari segi material maupun tenaga kerja, sehingga efektivitas program BSPS di masa mendatang dapat lebih optimal.

REFERENSI

- Ayunani, Y. D., Bakri, B., & Dunggio, S. (2022). Reducing Poverty Rates Through the Social Rehabilitation Program for Healthy Livable Homes in Monano District, North Gorontalo Regency. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(1), 1-7.
- Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Edward III, G. C. dalam Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Handayani, D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Masa Pandemi COVID-19 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 34-45. <https://doi.org/10.23887/jjis.v8i1.41440>.
- Hardani (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

- Igirisa, Irawaty. (2022). Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Igirisa, I., Rahman, M., Abdussamad, J., Abdusamad, Z., & Husain, A. K. (2020). Implementation of Development Policy for Livestock Farming Business in Gorontalo Regency, Gorontalo, Indonesia. *Sys Rev Pharm* 2020-11(12), 138–142. <https://doi:10.31838/srp.2020.12.23>.
- Igirisa Irawaty. 2012. Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo.
- Igirisa, I., Isa, R. A., & Tohopi, R. (2020). Institutional Strengthening Strategy of Cocoa Farmer Group in Increasing Income of Cocoa Farmers in Pohuwato Regency, Gorontalo Province. *29* (4), 2892–2898.
- Islamy, M. I. (2001). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Strategi nasional perumahan swadaya di Indonesia. Jakarta: Bappenas.
- Luaylik, N. F. (2020). Dari Negara menjadi Publik Sentris: Kajian Historis Pelaksanaan Administrasi Indonesia Tahun 1900-an. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 1(1), 63-73. <https://doi.org/10.22515/isnad.v1i1.3239>.
- Mamonto, D. M., Abdussamad, J., Prihatini, F., & Tui, D. (2022). Implementasi Program Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Bone Bolango
- Marliani, L. (2019). Sejarah Perkembangan Administrasi sebagai Seni dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 252-259. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3095>.
- Muluk, M. R. K. (2020). Inovasi dalam Paradigma Administrasi Publik. Pustaka. Ut.Ac. Id, 1-47.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Panyue, M. I., Aneta, A., & Aneta, Y. (2022). Implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kabupaten gorontalo. *Jambura*, 3.
- Pasolong, Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Subianto, A. (2020). Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In- (Ed.), Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT (2020th ed.). Brilliant.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Strategi kebijakan perumahan swadaya di Indonesia. Bappenas. Syafie, Inu kencana. (2018). Ilmu Administari Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Viyulia, Arenawati, & Sjafari, A. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1-13.
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Regulasi Peraturan BSPS

UU Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 13 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor : 3 /SE/Dr/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan bupati Bone Bolango nomor 74 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan program pemberian bantuan rumah layak huni, relokasi/rehabilitasi rumah korban bencana dan permukiman kumuh.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

